

"Peumulia Jamee" Investor Migas



Ilustrasi peresmian Migas Center di Universitas Malikussaleh. Foto: Bustami Ibrahim

Oleh: Aji Jufridar*

Investasi sektor migas dan gas di Aceh kembali menggeliat dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan bertambahnya wilayah kerja yang digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), baik di darat maupun lepas pantai. Belum semua wilayah kerja menyemburkan kabar gembira, beberapa di antaranya masih dalam tahap studi geofisika dan pemetaan sosial dengan memberdayakan potensi lokal seperti perguruan tinggi dan lembaga adat. Namun, kehadiran sejumlah perusahaan migas internasional di Aceh mengindikasikan banyak aspek positif bagi Aceh, termasuk dari sisi iklim investasi.

Aceh pernah mengalami masa jaya sekaligus masa kelam dari sektor migas yang seolah membuktikan mitos kutukan sumber daya alam. Kekayaan gas di ladang Arun pernah menjadi penopang APBN lebih dari satu dekade, tetapi percikan kekayaan itu tidak menetes ke Aceh sebagai daerah penghasil. Potret kemiskinan bahkan bisa dilihat sampai sekarang di ketiak ladang yang kini digarap perusahaan lokal ketika cadangan gasnya tinggal residu (*tail gas*).

Citra buruk perusahaan migas juga lahir karena masalah keamanan. Di tengah pemerintahan yang represif, perusahaan migas dituding ikut memfasilitasi militer dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini semakin menguatkan kesan negatif perusahaan migas sebagai sosok asing yang bengis dan tak terjangkau, tetapi datang untuk mengeruk kekayaan Aceh. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, lebih-lebih kesejahteraan terhadap masyarakat lokal tidak terjadi selama lebih dari 30 tahun ladang Arun dikeruk.

Pola baru

Dengan kenangan buruk itulah perusahaan nasional dan multinasional kini masuk ke Aceh. Investasi besar dalam sektor migas harus diikuti dengan perjuangan menampilkan citra yang ramah, peduli kepada masyarakat lokal, sehingga bisa mendapat dukungan dalam seluruh tahapan kegiatan hulu migas. Harapan adanya dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap kegiatan hulu industri migas, tergambar dari proses yang dilakukan sejumlah perusahaan yang sudah mendapatkan hak pengelolaan blok di Aceh. Kini kontraktor migas memulai dengan pola baru yang melahirkan harapan baru bagi kemakmuran Aceh.

Mereka membangun kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga adat seperti panglima laot sejak dari masa survei. Keputusan membangun sinergitas dengan lembaga adat tersebut membuktikan perusahaan migas sudah memahami struktur organisasi tradisional di Aceh. Untuk tahapan survei kapal yang melintasi perairan Aceh, misalnya, panglima laot dilibatkan tidak hanya untuk mengetahui adat melaut nelayan Aceh, tetapi juga mendata jumlah rumpon yang akan dilintasi kapal survei.

Jalur yang dilalui kapal survei menyebabkan rumpon milik nelayan menjadi rusak sehingga perusahaan survei ingin memberikan ganti untung. Kondisi tersebut mencerminkan penghargaan terhadap lembaga lokal sekaligus upaya menjaga keberlangsungan usaha nelayan. Namun ada juga yang nakal menyikapi keramahan investor dengan menambahkan rumpon liar di jalur yang bakal dilalui kapal survei karena harga ganti untung sekitar Rp60 juta sangat menggiurkan, jauh di bawah modal membuat rumpon liar yang tidak dimaksudkan untuk menjadi rumah ikan.

Karpet merah investor

Investasi di sektor migas merupakan investasi padat modal dan tinggi risiko. Setelah mendapatkan hak pengelolaan wilayah kerja, KKKS sendiri yang mengeluarkan biaya tinggi untuk melaksanakan seluruh tahapan industri hulu migas. Seluruh risiko menjadi tanggung jawab investor ketika hasilnya *zonk* atau tidak ditemukan cadangan gas atau minyak bumi. Namun bila berhasil, pemerintah tinggal menerima bagi hasil.

Tanggal: 09 December 2021

Post by: [kurniawati](#)

Kategori: [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#), [Aceh](#), [Unimal Hebat](#),